

# Investasi Versus Perilaku Spekulasi

Oleh ASEP SUMARYANA

**P**T Wahana Bersama Globalindo atau WBG mungkin tidak dikenal masyarakat bila tidak memakan korban pe-tinggi negeri ini. Kasus PT WBG kemudian menjadi konsumsi media dan disuguhkan ke publik. Dengan sekitar 5000 nasabah, perusahaan investasi ini telah memakan korban dengan nilai mencapai Rp 3,5 triliun. Sebanyak 4.070 nasabah telah diperiksa sebagai saksi, sementara beberapa pentolannya telah digiring ke sel.

Perusahaan yang memasarkan investasi Dressels Investment Limited ini begitu canggih sehingga mampu "mengadali" banyak tokoh yang malang melintang dalam dunia semacam itu. Tercatat mantan Direktur Utama Bursa Efek, mantan Wakil Direktur Utama Pertamina, Vice President Shell, dan mantan Deputi Bappenas.

Di Bandung praktik serupa dilakukan Irterbanking Bisnis Terencana (Ibist) yang tokoh pentingnya sudah ditangkap. Kembaran lainnya, Sarana Pratama Indoglobal (SPI), memperoleh uang dari nasabah hampir dua kali lipat WBG. Dengan janji bunga setidaknya 22-28 persen per tahun, perusahaan tersebut membayar bunga bulanan dengan lancar pada bulan-bulan pertama. Selanjutnya, tergantung target yang diincarnya sudah sepadan atau belum, sementara "kurcaci" yang "dibemperkannya" banyak tidak mengerti prosedur perjalanan uang yang dihimpunnya.

Maraknya usaha semacam itu agak bersinggungan dengan budaya spekulasi bangsa ini. Munculnya judi togel, nalo, totokoni, SDSB, dan banyak spekulasi dalam komoditas migas ataupun sembako dilatarbelakangi perilaku yang ingin

memperoleh untung besar dengan cara enteng.

Berbeda dengan praktik multi-level marketing (MLM) yang keuntungannya berbanding lurus dengan usaha keras, cenderung kurang banyak diminati oleh kelompok spekulasi. Dengan demikian, sewaktu ramai investasi, seperti QSAR ataupun usaha bebek yang menjanjikan untung besar, pemilik uang pun ramai-ramai menginvestasikan uangnya.

## Bisnis fiktif

Dengan kemampuan menghasilkan uang cukup, tampaknya seseorang dapat hidup dengan tenang, apalagi dana segar miliaran tersedia juga. Jika disimpan di bank dengan bunga 8-10 persen per tahun, kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan memadai. Namun, bagi kalangan tertentu, bunga bank tidak menggiurkan karena dianggap rendah sehingga perlu diputar dalam sebuah bisnis. Celah seperti ini telah diintip pihak yang naluri bisnis fiktifnya tinggi. Dengan iming-iming keuntungan besar, rekayasa pun dibuat sedemikian rupa sehingga "buaya" pun dapat "dikadalin".

Dalam budaya paternalistik, kemungkinan keterlibatan pe-tinggi dan tokoh negeri sangat besar untuk menjadi *vote getter* dalam menyerap dana dari masyarakat lainnya. Nasabah lain tergiur karena ada pejabat yang berinvestasi sehingga risiko kerugian dianggap kecil. Akibatnya, bisnis ini bergumpal menjadi besar dan menggurita. Banyak di antara korban yang menggadaikan rumah, meminjam, menggunakan uang organisasi yang dikelola, atau menjual aset berharga lainnya. Umumnya hal itu dilakukan dengan memperhitungkan bunga yang dapat menutupi semuanya. Bila demikian, tidak perlu promosi terbuka, cukup bisik-bisik tetangga, nasabah pun berdatangan menyimpan uang.

Bagi pemilik uang besar dari usaha "sim salabim", mungkin investasi ini tidak saja dipandang sebagai peluang mendapat untung besar, tetapi juga dari sisi keamanan lalu lintas uang. Sementara pihak bank akan meminta mencantumkan sumber dana ketika nasabah akan menyiripkan uang dengan jumlah besar (minimal Rp 100 ju-



**Kewaspadaan pihak bank menerima uang besar tidak bisa dipersalahkan karena hal tersebut tidak lepas dari upaya menutup lalu lintas pencucian uang.**

ta). Ketika akan mengambil dengan jumlah tertentu, nasabah diharuskan menyebut penggunaan-nya.

Ketertutupan pihak bank seperti itu tentu dianggap menghambat lalu lintas uang sehingga bank di luar negeri, seperti Singapura ataupun Eropa, dianggap sebagai pilihan yang aman dan tidak *reseh*. Di dalam negeri, menyimpan dalam bentuk investasi lebih aman ketimbang li bank.

## Pencucian uang

Kewaspadaan pihak bank menerima uang besar tidak bisa dipersalahkan karena hal tersebut tidak lepas dari upaya menutup lalu lintas pencucian uang. Sumber uang hasil pencucian uang biasanya tidak jelas. Dapat saja dari penipuan, korupsi, manipulasi, *kick back* atau penyalahgunaan wewenang yang dimiliki seseorang. Ketika uang Tommy dari BNP diperbincangkan, sumber uang dalam kasus WBG, SPI ataupun Ibist dan sejenisnya tampaknya perlu dilacak pula.

Pertama, sisi penyaluran dana yang dilakukan pengelola sehingga terurai aliran dana dari hulu sampai hilir. Dalam konteks ini tentu saja yang penting adalah memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat luas. Dengan kelengkapan informasi, perilaku spekulasi terus dapat dibina supaya tidak menyebabkan kerugian materiil ataupun imate-riil. Bahkan, kalau bisa diminimalisasi dan diganti dengan perilaku kerja keras. Sampai saat ini upaya tersebut belum dilakukan secara intensif oleh pihak terkait sehingga pengulangan perilaku terus terjadi dan kerugian tidak dapat

dihindarkan.

Kedua, sisi sumber dana yang masuk. Ketika praktik KKN sedang gencar diberantas, seperti janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal pemerintahannya, setiap celah yang memungkinkan terjadinya lalu lintas uang tersebut perlu dilacak tuntas. Kerja sama dengan Pemerintah Singapura untuk mengembalikan dana koruptor yang diparkir di sana juga diimbangi dengan upaya mengendus dana koruptor yang 20 persen berputar di dalam negeri.

Pandangan miring masyarakat terhadap pejabat tinggi yang memiliki uang banyak tentunya perlu diklarifikasi sehingga adanya pejabat yang tertipu WBG atau yang lainnya mendapat kepastian posisi sosialnya. Gamangnya penelusuran dari sisi sumber dana akan mempertebal lebel miring masyarakat terhadap pejabat publik atau tokoh republik yang turut menjadi korban penipuan. Bisa saja ke depan muncul stigma adanya kongkalikong pejabat dengan penjahat dalam kasus investasi fiktif tersebut.

Keberanian moral pihak berwenang dan *political will* pemerintah tampaknya ditunggu banyak pihak untuk menjernihkan nama baik pejabat publik yang tertipu. Barangkali jika pemilik kekuasaan cenderung korup seperti dikatakan Lord Acton, berarti kebenarannya di lapangan perlu diklarifikasi. Mungkin kasus WBG, SPI ataupun Ibist bisa dijadikan *trigger* untuk mempertebal tekad pemerintah memberangus kesumiran yang ada dalam tubuh birokrasi dan masyarakat.

Pembuktian tuntas dari kasus yang muncul tentu bukan lantaran pejabat menjadi korban, tetapi juga dalam hal dugaan ada pejabat yang menjadi dalang. Dalam perjalanan pengusutan, masyarakat perlu mendapat pembelajaran mengenai perilaku spekulasi yang menyuburkan berbagai praktik miring serta meluruskan pandangan terhadap tokoh negeri agar jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga pula.

ASEP SUMARYANA  
Lektor Kepala pada  
Jurusan Administrasi Negara  
FISIP Universitas Padjadjaran  
dan Sekretaris LP3AN  
Universitas Padjadjaran